



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jl. Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116

Email : dinsos@bangkalankab.go.id

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 merupakan dokumen sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Sampai Dengan Triwulan 2 Tahun Berjalan, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Penutup.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun berjalan dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2023, untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan serta perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui perubahan Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, 4 September 2023

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bangkalan



WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERJALAN	 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester 1 Tahun Berjalan dan Capaian Renstra PD	 5
 Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 18
3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja	19
3.2. Matriks Rancangan Perubahan Rencana Kerja	20
 Bab IV PENUTUP	 32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan diproses menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan evaluasi kinerja di tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memicu kinerja pada tahun yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2023 Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
- f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial Tahun 2020 - 2024;
- g. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaga Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran daerah Nomor 76);
- l. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
- m. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 47/E);
- n. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 41 tahun 2016 kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2023 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja 2023 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 serta evaluasi kinerja di tahun 2022 dapat memicu pada rencana kerja tahun yang akan datang.

2. Memberikan arah pembangunan urusan Sosial di Kabupaten Bangkalan selama 1 (satu) tahun kedepan.
3. Membantu dalam mencapai visi dan misi Dinas Sosial dan Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, RENSTRA 2018-2023 dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2023 maka dapat ditetapkan Sistematika penulisan dengan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI

SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN RENSTRA

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN 2 TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Semester 1 Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan sampai dengan semester 1 tahun berjalan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2018 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-2)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023 semester 1)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)*100		9		10 = (5 + 7 + 9)		11 = (10/4)*100
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	21.442.513.851	100 %	5.631.913.067	100 %	6.141.324.708	100 %	5.852.013.163	100,00	95,29	100 %	6.815.397.519	100 %	18.299.323.749	100
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	173.440.850	100 %	15.900.750	100 %	17.440.300	100 %	9.905.550	100,00	56,80	100 %	24.695.000	100 %	50.501.300	100
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	9 dokumen	84.942.700	4 dokumen	6.492.700	3 dokumen	5.679.250	3 dokumen	4.155.750	100,00	73,17			7 dokumen	10.648.450	78
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											3 dokumen	6.970.550	3 dokumen	6.970.550	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	6 dokumen	15.871.000	2 dokumen	2.696.000	2 dokumen	3.959.200	2 dokumen	1.492.200	100,00	37,69			4 dokumen	4.188.200	67
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											2 dokumen	4.000.000	2 dokumen	4.000.000	
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	6 dokumen	15.722.650	2 dokumen	2.547.650	2 dokumen	2.941.200	2 dokumen	0	100,00	0,00			4 dokumen	2.547.650	67
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											2 dokumen	4.000.000	2 dokumen	4.000.000	

1.06.01. 2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 doku men	12.500. 000	0	0	2	0	0	0	0,0 0	0,0 0	0 doku men	0	0 doku men	0	0
1.06.01. 2.01.05	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 doku men	12.500. 000	0	0	2	0	0	0	0,0 0	0,0 0	0 doku men	0	0 doku men	0	0
1.06.01. 2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3 doku men	15.708. 300	1 doku men	3.208.2 00	1 doku men	2.166.5 00	1 doku men	2.164.6 00	100 ,00	99, 91			2 doku men	5.372.8 00	67
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											1 Lapo ran	4.895.4 50	1 Lapo ran	4.895.4 50	
1.06.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	24 lapora n	16.196. 200	8 lapor an	956.20 0	8 lapor an	2.694.1 50	8 lapor an	2.093.0 00	100 ,00	77, 69			16 Lapo ran	3.049.2 00	67
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											8 Lapo ran	4.829.0 00	8 Lapo ran	4.829.0 00	
1.06.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	10 0 %	12.757. 765.370	10 0 %	3.895.1 06.588	10 0 %	3.945.7 41.990	10 0 %	3.847.9 08.487	100 ,00	97, 52	100 %	4.073.6 87.930	100 %	11.816. 703.005	100
1.06.01. 2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/ bulan	12.699. 941.370	49 org/ bln	3.886.2 72.588	42 org/ bln	3.931.8 95.290	42 org/ bln	3.834.5 10.487	100 ,00	97, 52			91 org/b ln	7.720.7 83.075	186
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN											45 oran g	4.058.1 93.680	45 oran g	4.058.1 93.680	
1.06.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	2 lapora n	12.500. 000	0 lapor an	0	1 lapor an	2.954.3 00	1 lapor an	2.557.5 00	100 ,00	86, 57			1 Lapo ran	2.557.5 00	50
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											1 Doku men	4.557.6 00	1 Doku men	4.557.6 00	

1.06.01. 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi SKPD yang tersusun	2 laporan	12.500.000	0 laporan	0	1 laporan	3.719.850	1 laporan	3.689.600	100,00	99,19			1 Laporan	3.689.600	50
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											1 Dokumen	3.719.150	1 Dokumen	3.719.150	
1.06.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	3 laporan	15.324.000	1 laporan	3.834.000	1 laporan	3.955.050	1 laporan	3.944.100	100,00	99,72			2 Laporan	7.778.100	67
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	
1.06.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	198 laporan	17.500.000	66 laporan	5.000.000	66 laporan	3.217.500	66 laporan	3.206.800	100,00	99,67			132 laporan	8.206.800	67
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD											18 Laporan	3.217.500	18 Laporan	3.217.500	
1.06.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	22.952.400	100 %	1.952.400	100 %	1.503.500	100 %	1.498.000	100,00	99,63	100 %	5.235.950	100,00 %	8.686.350	100
1.06.01. 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun	3 laporan	10.500.000	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	#DIV/0!	#DIV/0!			0 laporan	0	0
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											1 dokumen	2.760.200	1 dokumen	2.760.200	
1.06.01. 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 laporan	12.452.400	14 laporan	1.952.400	14 laporan	1.503.500	14 laporan	1.498.000	100,00	99,63			28 Laporan	3.450.400	67
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											14 Laporan	2.475.750	14 Laporan	2.475.750	

1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	337.586.850	100 %	30.506.850	100 %	17.753.400	100 %	17.228.050	100,00	97,04	100 %	13.573.550	100,00	61.308.450	100
1.06.01.2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 unit	25.000.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	#DIV/0!	#DIV/0!			0 unit	0	0
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai											1 unit	3.149.550	1 unit	3.149.550	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	270 buah	125.076.850	90 buah	30.506.850	90 buah	14.850.000	90 unit	14.400.000	100,00	96,97			180 buah	44.906.850	67
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan											paket		0 paket	0	
1.06.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang tersusun	14 laporan	10.500.000	0 laporan	0	7 laporan	1.132.000	7 laporan	1.128.800	100,00	99,72			7 laporan	1.128.800	50
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											1 Dokumen	3.613.100	1 Dokumen	3.613.100	
1.06.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang tersusun	24 laporan	10.500.000	0 laporan	0	12 laporan	1.771.400	12 laporan	1.699.250	100,00	95,93			12 Laporan	1.699.250	50
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											12 Dokumen	6.810.900	12 Dokumen	6.810.900	
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar	185 orang	166.510.000	90												
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	854.872.681	100 %	124.919.879	100 %	279.269.375	93,77	268.323.278	93,77	96,08	100 %	499.473.509	97,92	892.716.666	98
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	132 unit	11.943.300	44 unit	3.447.800	72 unit	3.495.500	41 unit	2.010.000	56,94	57,50			85 unit	5.457.800	64

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											12 pake t	3.819.7 50	12 pake t	3.819.7 50	
1.06.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57 unit	68.603. 800	0 unit	0	96 unit 7	41.654. 675	91 unit 9	39.600. 000	95,04	95,07			919 unit	39.600. 000	1.612
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan											12 pake t	60.383. 365	12 pake t	60.383. 365	
1.06.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49 unit 5	14.822. 950	16 unit 5	4.813.9 50	17 unit 0	5.009.0 00	15 unit 8	4.660.5 00	92,94	93,04			323 unit	9.474.4 50	65
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan											12 pake t	7.278.6 00	12 pake t	7.278.6 00	
1.06.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 unit	177.782. .351	13 jenis	92.217. 849	4 jenis	54.055. 000	4 jenis	52.296. 000	100,00	96,75			17 jenis	144.513. .849	142
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan											12 pake t	92.747. 794	12 pake t	92.747. 794	
1.06.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	145.138. .280	2 jenis	16.898. 280	2 jenis	16.770. 800	2 jenis	15.001. 750	100,00	89,45			4 jenis	31.900. 030	67
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan											2 pake t	21.750. 000	2 pake t	21.750. 000	
1.06.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 jenis	11.480. 000	2 jenis	3.240.0 00	2 jenis	15.520. 000	2 jenis	13.400. 000	100,00	86,34			4 jenis	16.640. 000	67
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan											24 Doku men	47.520. 000	24 Doku men	47.520. 000	
1.06.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	50 kali	30.000. 000	0 kali	0	25 kali	6.368.0 00	25 kali	6.363.5 00	100,00	99,93			25 kali	6.363.5 00	50
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu											70 Lapo ran	14.875. 000	70 Lapo ran	14.875. 000	
1.06.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 kali 0	304.302. .000	11 kali 0	4.302.0 00	21 kali 8	90.096. 400	21 kali 8	88.873. 800	100,00	98,64			328 kali	93.175. 800	99

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											50 Lapo ran	195.89 9.000	50 Lapo ran	195.899 .000	
1.06.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang tersusun	1 lapora n	90.800. 000	0 lapor an	0	1 lapor an	46.300. 000	1 lapor an	46.117. 728	100 ,00	99, 61			1 lapor an	46.117. 728	100
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											1 Doku men	55.200. 000	1 Doku men	55.200. 000	
1.06.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	10 % 0	1.537.7 30.150	10 % 0	35.120. 150	10 % 0	265.82 3.943	95 % ,4 5	253.79 0.920	95, 45	95, 47	100 %	193.34 6.120	98,4 8 %	482.257 .190	98
1.06.01. 2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	39 unit	1.537.7 30.150	44 unit	35.120. 150	66 unit	265.82 3.943	63 unit	253.79 0.920	95, 45	95, 47			107 unit	288.911 .070	274
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan											22 unit	193.34 6.120	22 unit	193.346 .120	
1.06.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 % 0	3.805.7 35.550	10 % 0	1.221.2 15.550	10 % 0	1.129.3 41.880	10 % 0	1.052.1 25.119	100 ,00	93, 16	100 %	1.350.7 22.000	100, 00 %	3.624.0 62.669	100
1.06.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 jenis	6.660.0 00	2 jenis	6.660.0 00	0 jenis	0	0 jenis	0	#DI V/O!	#DI V/O!			2 jenis	6.660.0 00	100
1.06.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 jenis	360.480 .300	4 jenis	107.88 0.300	3 jenis	97.714. 380	3 jenis	94.672. 407	100 ,00	96, 89			7 jenis	202.552 .707	78
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan											12 Lapo ran	111.10 2.000	12 Lapo ran	111.102 .000	
1.06.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 jenis	51.518. 250	1 jenis	51.518. 250	0 jenis	0	0 jenis	0	#DI V/O!	#DI V/O!			1 jenis	51.518. 250	50

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan											2 Lapo ran	208.50 0.000	2 Lapo ran	208.500 .000	
1.06.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9 jenis	3.387.0 77.000	1 jenis	1.055.1 57.000	3 jenis	1.031.6 27.500	3 jenis	957.45 2.712	100 ,00	92, 81			4 jenis	2.012.6 09.712	44
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan											12 Lapo ran	1.031.1 20.000	12 Lapo ran	1.031.1 20.000	
1.06.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	10 % 0	1.952.4 30.000	10 % 0	307.19 0.900	10 % 0	484.45 0.320	66 %	401.23 3.759	66, 00	82, 82	100 %	654.66 3.460	88,6 7 %	1.363.0 88.119	89
1.06.01. 2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12 unit	951.410 .000	6 unit	235.15 8.000	1 unit	156.00 0.000	1 unit	154.87 8.000	100 ,00	99, 28			7 unit	390.036 .000	58
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya											15 unit	242.80 0.000	15 unit	242.800 .000	
1.06.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	76 unit	817.370 .000	1 unit	65.537. 900	19 unit	234.74 8.880	19 unit	170.62 0.759	100 ,00	72, 68			20 unit	236.158 .659	26
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya											5 unit	177.00 0.000	5 unit	177.000 .000	
1.06.01. 2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	16 unit	2.840.0 00	0 unit	0	4 unit	1.420.0 00	2 unit	550.00 0	50, 00	38, 73			2 unit	550.000	13
		Jumlah Mebel yang dipelihara											16 unit	2.900.0 00	16 unit	2.900.0 00	
1.06.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	120.000 .000	0 unit	0	1 unit	63.281. 440	1 unit	63.160. 000	100 ,00	99, 81			1 unit	63.160. 000	25

		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi											1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	19 unit 7	60.810.000	3 unit	6.495.000	63 unit	29.000.000	26 unit	12.025.000	41,27	41,47			29 unit	18.520.000	15
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi											63 unit	181.963.460	63 unit	181.963.460	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	29 %	1.592.376.800	7,69 %	258.313.950	19 %	472.736.700	11,46 %	442.940.800	60,32	93,70	24 %	345.861.550	43,15 %	1.047.116.300	149
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	29 %	1.592.376.800	7,69 %	258.313.950	19 %	472.736.700	11,46 %	442.940.800	60,32	93,70	24 %	345.861.550	43,15 %	1.047.116.300	149
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah (Pekerja Sosial Masyarakat) PSM yang telah dibina	10 orang 0	100.000.000	55 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	#DI V/0!	#DI V/0!			55 orang	0	55
		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											70 orang	0	70 orang	0	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang terbina	18 orang	427.170.650	18 orang	88.770.650	18 orang	146.016.700	18 orang	143.263.000	100,00	98,11			36 orang	232.033.650	200
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota											18 orang	135.069.050	18 orang	135.069.050	

1.06.02. 2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan hasil monitoring	5 laporan	945.206.150	1 laporan	125.410.150	1 laporan	107.336.000	1 laporan	83.035.000	100,00	77,36			2 laporan	208.445.150	40
		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota											7000 Keluarga	108.652.000	7000 Keluarga	108.652.000	
1.06.02. 2.03.04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah LKS yang dibantu	12 lembaga	120.000.000	6 lembaga	44.133.150	11 lembaga	219.384.000	11 lembaga	216.642.800	100,00	98,75			17 lembaga	260.775.950	142
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota											14 lembaga	102.140.500	14 lembaga	102.140.500	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlanter, anak terlanter, lanjut usia terlanter dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100 %	2.598.612.250	2,80 %	624.007.350	100 %	1.450.503.459	90,33 %	1.239.422.789	90,33	85,45	100 %	1.284.875.091	64,37667 %	3.148.305.230	64
1.06.04. 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia terlanter dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	200 orang	2.338.729.650	104 orang	590.336.350	746 orang	1.397.897.009	684 orang	1.195.501.709	91,69	85,52	175 orang	1.137.155.191	963 orang	2.922.993.250	482
1.06.04. 2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga anak terlanter, lanjut usia yang di bimbing	130 orang	190.763.300	64 orang	42.370.000	246 orang	694.922.500	211 orang	603.359.000	85,77	86,82			275 orang	645.729.000	212

		Jumlah keluarga penyanggah disabilitas yang di bimbing	70 orang		40 orang		50 orang		47 orang		94,60	#DI V/0!			513 orang	0	733
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											800 orang	421.774.000	800 orang	421.774.000	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dokumen masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam sistem layanan rujukan terpadu (SLRT)	3 dokumen	2.147.966.350	1 dokumen	547.966.350	1 dokumen	702.974.509	1 dokumen	592.142.709	100,00	84,23			2	1.140.109.059	67
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota											200 orang	715.381.191	2000 orang	715.381.191	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	14 orang	259.882.600	40 orang	33.671.000	40 orang	52.606.450	26 orang	43.921.080	65,00	83,49	40 orang	147.719.900	106 orang	225.311.980	76
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	Jumlah gelandangan pengemis dan masyarakat yang di bimbing	405 orang	259.882.600	127 orang	33.671.000	40 orang	52.606.450	26 orang	43.921.080	65,00	83,49			153 orang	77.592.080	38
		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota											40 orang	147.719.900	40 orang	147.719.900	
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100 %	5.422.783.722	91,37 %	4.374.985.422	100 %	1.614.792.830	99,97 %	1.281.717.150	99,97	79,37	100 %	1.124.727.100	97,11 %	6.781.429.672	97

1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	100 %	5.422.783.722	91,37 %	4.374.985.422	100 %	1.614.792.830	99,97 %	1.281.717.150	99,97	79,37	1 %	1.124.727.100	64,11 %	6.781.429.672	64
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	5.940 orang	4.121.460.872	1.980 orang	4.373.662.572	3.296 orang	759.458.750	3.296 orang	683.545.000	100,00	90,00			5.276 orang	5.057.207.572	89
		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata											400.000 orang	400.000.000	400.000 orang	400.000.000	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Dokumen data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) - Laporan hasil monitoring dan evaluasi PKH	5 dokumen	1.301.322.850	1 dokumen	1.322.850	1 dokumen	832.519.480	1 dokumen	577.830.000	100,00	69,41			2 dokumen	579.152.850	40
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota											2750 Keluarga	200.974.750	2.750 Keluarga	200.974.750	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	0	0 keluarga	0	20 keluarga	22.814.600	19 keluarga	20.342.150	95,00	89,16			19 Keluarga	20.342.150	#DIV/0!
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota											12 Keluarga	523.752.350	12 Keluarga	523.752.350	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	1.847.063.078	100 %	318.815.828	100 %	4.322.768.987	85,04 %	3.343.197.500	85,04	78,18	100 %	1.029.391.120	95,01 %	4.691.404.448	95
1.06.06.2.01	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100 %	1.346.579.778	100 %	195.182.728	100 %	4.097.600.437	85,04 %	3.203.452.500	85,04	78,18	100 %	834.277.420	95,01 %	4.232.912.648	95
1.06.06.2.01.01	Penyediaan makanan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang di fasilitasi kebutuhan dasarnya	100 %	1.346.579.778	89 %	195.182.728	100 %	4.097.600.437	100 %	3.203.452.500	100,00	78,18			189	3.398.635.228	189
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota											425 orang	834.277.420	425 orang	834.277.420	

1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi	100 %	500.483.300	100 %	123.633.100	100 %	225.168.550	80	139.745.000	80,00	62,06	100 %	195.113.700	93 %	458.491.800	93
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	85 orang	500.483.300	25 orang	123.633.100	30 orang	225.168.550	24 orang	139.745.000	80,00	62,06			49 orang	263.378.100	58
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota											24 orang	195.113.700	24 orang	195.113.700	
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100 %	901.065.100	100 %	307.873.200	100 %	146.930.000	100 %	136.684.900	100,00	93,03	100 %	162.743.800	100 %	607.301.900	100
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100 %	901.065.100	100 %	307.873.200	100 %	146.930.000	100 %	136.684.900	100,00	93,03	100 %	162.743.800	100 %	607.301.900	100
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) yang di pelihara	1 lokasi	476.621.500	1 lokasi	136.621.500	1 lokasi	128.790.000	1 lokasi	124.839.900	100,00	96,93			2	261.461.400	200
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota											50 Makam	126.149.000	50 Makam	126.149.000	
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2 kegiatan	424.443.600	2 kegiatan	171.251.700	2 kegiatan	18.140.000	2 kegiatan	11.845.000	100,00	65,30			4 kegiatan	183.096.700	200
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											2 Laporan	36.594.800	2 Laporan	36.594.800	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai dinas daerah yang melaksanakan pembangunan di bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang berkualitas.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2023
Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

TUJUAN							SASARAN							KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi			Target		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi			Target		
		2020	2021	2022	2023	Perubahan			2020	2021	2022	2023	Perubahan	
1	2				3	4	5	6				7	8	9
Menurunnya PMKS/PPKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan	Jumlah PMKS/PPKS	501.674	638.972	721.044	501.338	501.338	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	7	7,91	8	10,04	10,04	
							Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	0	7,69	9,29	24	24	
Meningkatnya Kinerja Urusan Sosial	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Sosial	0	100	100	100	100	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan internal layanan kesekretariatan	100	100	100	100	100	

Tabel 3.2
Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Renja 2023					Perubahan Renja Tahun 2023						
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100 %	6.815.397 .519		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100 %	6.179.803 .568		- 635.593. 951	
1.06.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	24.695.00 0		Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	5.873.317		- 18.821.6 83	
1.06.01.2. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	3 dokum en	6.970.550	DAU M	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	dokum en	4.092.700	DAU M	- 2.877.85 0	Refocus ing penyes uaian anggara n DAU Earmar ked
1.06.01.2. 01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinsos	2 dokum en	4.000.000	DAU M	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinsos	2 dokum en	460.500	DAU M	- 3.539.50 0	Refocus ing penyes uaian anggara n DAU Earmar ked

1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	2 dokum en	4.000.000	DAU M	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	2 dokum en	510.617	DAU M	- 3.489.383	Refocus ing penyes uaian anggara n DAU Earmar ked
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	1 Lapora n	4.895.450	DAU M	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	1 Lapora n	469.500	DAU M	- 4.425.950	Refocus ing penyes uaian anggara n DAU Earmar ked
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	8 Lapora n	4.829.000	DAU M	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	8 Lapora n	340.000	DAU M	- 4.489.000	Refocus ing penyes uaian anggara n DAU Earmar ked
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi		100 %	4.073.687.930		Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi		100 %	3.929.235.321		- 144.452.609	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	45 orang/b ulan	4.058.193.680	DAU M	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	43 orang/b ulan	3.914.165.203	DAU M	- 144.028.477	Refocus ing penyes uaian anggara n DAU Earmar ked
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	1 Dokum en	4.557.600	DAU M	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	1 Dokum en	3.442.650	DAU M	- 1.114.950	Refocus ing penyes uaian anggara n DAU Earmar ked

1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinsos	1 Dokumen	3.719.150	DAU M	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinsos	1 Dokumen	2.573.750	DAU M	- 1.145.400	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	1 Laporan	4.000.000	DAU M	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	1 Laporan	2.619.568	DAU M	- 1.380.432	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinsos	18 Laporan	3.217.500	DAU M	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinsos	18 Laporan	6.434.150	DAU M	3.216.650	
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun		100 %	5.235.950		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun		100 %	3.997.900		- 1.238.050	
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinsos	1 dokumen	2.760.200	DAU M	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinsos	1 dokumen	483.000	DAU M	- 2.277.200	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked

1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinsos	14 Laporan	2.475.750	DAU M	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinsos	14 Laporan	3.514.900	DAU M	1.039.150	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana		100 %	13.573.550		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana		100 %	7.886.550		- 5.687.000	
1.06.01.2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinsos	1 unit	3.149.550	DAU M	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinsos	0 unit	0	DAU M	- 3.149.550	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked
1.06.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinsos	1 Dokumen	3.613.100	DAU M	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinsos	1 Dokumen	3.635.050	DAU M	21.950	
1.06.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinsos	12 Dokumen	6.810.900	DAU M	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinsos	12 Dokumen	4.251.500	DAU M	- 2.559.400	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	499.473.509		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	307.920.350		- 191.553.159	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinsos	12 paket	3.819.750	DAU M	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinsos	12 paket	5.302.850	DAU M	1.483.100	

1.06.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinsos	12 paket	60.383.365	DAU M	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinsos	12 paket	50.540.900	DAU M	- 9.842.465	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked
1.06.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinsos	12 paket	7.278.600	DAU M	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinsos	12 paket	5.418.600	DAU M	- 1.860.000	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked
1.06.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinsos	12 paket	92.747.794	DAU M	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinsos	12 paket	59.820.000	DAU M	- 32.927.794	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked
1.06.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinsos	2 paket	21.750.000	DAU M	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinsos	2 paket	12.520.000	DAU M	- 9.230.000	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked
1.06.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinsos	24 Dokumen	47.520.000	DAU M	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinsos	24 Dokumen	24.020.000	DAU M	- 23.500.000	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked
1.06.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinsos	70 Laporan	14.875.000	DAU M	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinsos	70 Laporan	12.250.000	DAU M	- 2.625.000	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked

1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Propinsi/Kabupaten/Kota	50 Laporan	195.899.000	DAU M	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Propinsi/Kabupaten/Kota	50 Laporan	108.048.000	DAU M	- 87.851.000	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinsos	1 Dokumen	55.200.000	DAU M	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinsos	1 Dokumen	30.000.000	DAU M	- 25.200.000	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100 %	193.346.120		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100 %	151.323.030		- 42.023.090	
1.06.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinsos	22 unit	193.346.120	DAU M	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinsos	22 unit	151.323.030	DAU M	- 42.023.090	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1.350.722.000		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1.240.317.100		- 110.404.900	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinsos	12 Laporan	111.102.000	DAU M	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinsos	12 Laporan	121.659.600	DAU M	10.557.600	

1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinsos	2 Laporan	208.500.000	DAU M	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinsos	2 Laporan	156.000.000	DAU M	- 52.500.000	Refocusing penyediaan anggaran DAU Earmarked
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinsos	12 Laporan	1.031.120.000	DAU M	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinsos	12 Laporan	962.657.500	DAU M	- 68.462.500	Refocusing penyediaan anggaran DAU Earmarked
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100 %	654.663.460		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100 %	533.250.000		- 121.413.460	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinsos	15 unit	242.800.000	DAU M	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinsos	15 unit	199.360.000	DAU M	- 43.440.000	Refocusing penyediaan anggaran DAU Earmarked
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinsos	5 unit	177.000.000	DAU M	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinsos	5 unit	115.065.000	DAU M	- 61.935.000	Refocusing penyediaan anggaran DAU Earmarked
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Dinsos	16 unit	2.900.000	DAU M	Jumlah Mebel yang dipelihara	Dinsos	0 unit	0	DAU M	- 2.900.000	Refocusing penyediaan anggaran DAU Earmarked

1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinsos	1 unit	50.000.000	DAU M	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinsos	1 unit	200.000.000	DAU M	150.000.000	
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinsos	63 unit	181.963.460	DAU M	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinsos	48 unit	18.825.000	DAU M	-163.138.460	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		24 %	345.861.550		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		24 %	378.562.250		32.700.700	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina		24 %	345.861.550		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina		24 %	378.562.250		32.700.700	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	18 orang	135.069.050	DAU M	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	18 orang	134.860.000	DAU M	-209.050	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	7.000 Keluarga	108.652.000	DAU M	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	7.000 Keluarga	97.717.000	DAU M	-10.935.000	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked

1.06.02.2. 03.04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	14 lembaga	102.140.500	DAU M	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	13 lembaga	145.985.250	DAU M	43.844.750	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		100 %	1.284.875.091		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		100 %	1.752.420.209		467.545.118	
1.06.04.2. 01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		175 orang	1.137.155.191		Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		175 orang	1.614.710.459		477.555.268	
1.06.04.2. 01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	800 orang	421.774.000	DAU M	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	800 orang	884.972.200	DAU M	463.198.200	

1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	2000 orang	715.381.191	DAU M	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	2000 orang	729.738.259	DAU M	14.357.068	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		40 orang	147.719.900		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		40 orang	137.709.750		-10.010.150	
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Propinsi/Kabupaten/Kota	40 orang	147.719.900	DAU M	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Propinsi/Kabupaten/Kota	40 orang	137.709.750	DAU M	-10.010.150	Refocusing penyediaan anggaran DAU Earmarked
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial		100 %	1.124.727.100		Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial		100 %	1.064.685.200		-60.041.900	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi		100 %	1.124.727.100		Persentase keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi		100 %	1.064.685.200		-60.041.900	

1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Bangkalan	400.000 orang	400.000.000	DAU M	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Bangkalan	400.000 orang	438.250.000	DAU M	38.250.000	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	2750 Keluarga	200.974.750	DAU M	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	2159 Keluarga	556.435.200	DAU M	355.460.450	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	12 Keluarga	523.752.350	DBH CHT	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	42 Keluarga	70.000.000	DBH CHT	-453.752.350	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100 %	1.029.391.120		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100 %	879.587.793		-149.803.327	
1.06.06.2.01	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya		100 %	834.277.420		Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya		100 %	706.694.093		-127.583.327	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	425 orang	834.277.420	DAU M	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	425 orang	706.694.093	DAU M	-127.583.327	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked

1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi		100 %	195.113.700		Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi		100 %	172.893.700		- 22.220.000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	24 orang	195.113.700	DAU M	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	24 orang	172.893.700	DAU M	- 22.220.000	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola		100 %	162.743.800		Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola		100 %	110.134.600		- 52.609.200	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola		100 %	162.743.800		Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola		100 %	110.134.600		- 52.609.200	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	TMP Bangkalan	50 Makam	126.149.000	DAU M	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	TMP Bangkalan	50 Makam	38.700.000	DAU M	- 87.449.000	Refocusing penyesuaian anggaran DAU Earmarked
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	2 Laporan	36.594.800	DAU M	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	2 Laporan	71.434.600	DAU M	34.839.800	
					10.762.996.180					10.365.193.620		- 397.802.560	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2018 – 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Bangkalan, serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan maupun dengan perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Oleh karena eskalasi permasalahan sosial yang terus berkembang maka diperlukan reposisi prioritas dan arah pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangkalan, maka pada tahun 2023 lebih difokuskan pada program sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Program Penanganan Bencana

Prioritas tersebut di atas penting untuk mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2023, karena terkait dengan hal tersebut akan menimbulkan implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa penanganan dan pelayanan sosial terhadap PPKS sesungguhnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan,

penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh karenanya peningkatan penyediaan alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan menjadi sangat strategis dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

2. Program-program penanganan PPKS pada hakekatnya merupakan upaya untuk mencegah berkembang dan mengurangi populasi PMKS sekaligus menekan eksese-eksese yang ditimbulkan. Oleh karenanya Program tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, terpadu dan didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai.
3. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bencana alam, bencana sosial maupun bencana teknologi perlu disiapkan sebuah sistem pengelolaan pencegahan dan penanganan bencana secara terpadu. Oleh karenanya sistem pencegahan ini melalui pengembangan manajemen pengelolaan bencana berbasis masyarakat yang salah satunya adalah pembinaan terhadap TAGANA (Taruna Siaga Bencana), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), serta penguatan kelembagaan dalam pengelolaan bencana harus dilakukan.
4. Dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan yang profesional dan manusiawi dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Selain persoalan terkait dengan program prioritas kesejahteraan sosial di atas hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa penyediaan pelayanan harus merespon perubahan paradigma dan trend permasalahan sosial yang berkembang. Oleh karena itu diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan kesejahteraan sosial harus berorientasi pada pembangunan yang berbasis masyarakat (*community base*).
2. Peningkatan kualitas aparatur dalam menyiapkan pelayanan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan, korban trafficking, korban penelantaran dan eksploitasi serta kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tahun 2023 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2023.

Bangkalan, 4 September 2023

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bangkalan

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN" at the top and "DINAS SOSIAL" at the bottom, separated by two small stars. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Wibagio Suharta".

WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 197301261993021001